

BAB V

KESIMPULAN

Banyak hal terjadi saat Filipina menempatkan seorang pria mantan walikota kota Davao menjadi Presiden Filipina pertama yang berasal dari Mindanao. Rodrigo “Roa” Duterte melahirkan banyak kontroversi saat ia memulai kinerjanya sebagai orang nomor satu di Filipina. Kebijakan War on Drugs menjadi salah satu yang sangat disoroti tidak hanya di Filipina namun juga di dunia internasional. Ia mendapat julukan “The Punisher” atas janji-janjinya untuk menangkap seluruh Bandar dan pengguna narkoba di Filipina, memenjarakannya dan lebih ekstrim akan membunuhnya. Jauh sebelum menjadi presiden, Duterte secara konsisten telah mengatakan tujuannya untuk memberantas narkoba saat masih menjadi Walikota Davao dan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2016. “Davao Death Squad” merupakan salah satu realisasi dari tujuannya memberantas narkoba sekaligus kriminalitas di Davao, dan kali ini Duterte menggunakan cara yang sama untuk menangkap seluruh Bandar narkoba yang tersebar di seluruh wilayah Filipina.

Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Campaign Plan Project: Double Barrel atau disebut dengan Operation Plan (Oplan) Double Barrel diresmikan pada tanggal 1 Juli 2016, tepat setelah Duterte memasuki hari pertamanya sebagai Presiden Terpilih Filipina. Proyek anti-narkoba ini menjadi ditargetkan untuk memberantas tuntas narkoba selama 6 bulan pertama masa kepemimpinan Duterte. Tertulis dalam

laporan peresmian, Oplan Double Barrel dibentuk atas komando langsung dari Duterte. Ia juga mengatakan kepada kepolisian untuk tidak segan-segan membunuh para Bandar apabila mereka menolak untuk ditangkap atau melakukan tindakan impulsif yang merugikan.

Setelah Oplan Double Barrel resmi diberlakukan, dunia dikejutkan dengan berita ribuan warga tewas akibat operasi kepolisian yang dilakukan dibawah perintah Duterte. Media internasional CNN memberitakan, hingga Desember 2016 sebanyak 5.927 warga tewas tertembak, 2.086 jiwa diantaranya tewas akibat Oplan Double Barrel sedangkan sisanya masih dalam investigasi kepolisian. Diduga 3.481 jiwa tersebut dibunuh oleh oknum bersenjata tidak dikenal untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Angka tersebut mengejutkan banyak pihak, terutama negara dan organisasi internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Kebijakan War on Drug ini jelas melanggar nilai-nilai tersebut, dengan langsung membunuh seseorang yang masih berstatus tersangka tanpa melalui proses hukum yang benar.

Terdapat empat hal yang menjadi kritik dari organisasi internasional di bidang kemanusiaan seperti, United Nation Commission of Human Rights (UNCHR), Human Rights Watch (HRW), Amnesty International, dan lainnya. Organisasi kemanusiaan tersebut mengkritik kebijakan Duterte serta memintanya menghentikan dengan segera Oplan Double Barrel. Empat hal tersebut yakni:

1. Kebijakan War on Drugs melegalkan praktek extrajudicial killings atau pembunuhan di luar hukum
2. Hak asasi seorang individu terampas oleh adanya Oplan Double Barrel, bahkan seorang tersangka memiliki hak untuk membela diri dan hak lainnya
3. Memunculkan masalah baru, yakni adanya oknum-oknum bersenjata yang berbahaya dan bergerak sesuai dengan kehendak kepentingan salah satu kelompok atau individu
4. Kondisi penjara yang tidak sesuai dengan standar internasional dan tidak layak untuk menjadu hunian tersangka kriminal.

Meskipun mendapat protes dan kritik dari internasional tidak membuat Duterte menyerah dari mimpinya melihat Filipina bebas narkoba. Banyak dari kritik tersebut yang tidak ditanggapi Duterte ataupun ia meminta pihak internasional untuk tidak mencampuri urusan kebijakan dalam negerinya. Terdapat dua alasan Duterte, mengapa ia tetap melanjutkan kebijakan War on Drug nya meski menerima kritik dan kecaman dari internasional. Yakni, pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama kepemimpinan Presiden Duterte dan Oplan Double Barrel efektif menurunkan angka pengguna narkoba di Filipina serta berhasil menjebloskan puluhan ribu Bandar dan pengguna narkoba ke penjara dan tempat rehabilitasi.

Masalah narkoba telah menjadi kanker bagi warga Filipina terutama para generasi mudanya. Dari hasil operasi kepolisian, tersangka narkoba yang berhasil

ditangkap adalah anak-anak muda yang menjadi masa depan Filipina. Apabila narkoba tidak segera disingkirkan, masa depan Filipina tentu akan menjadi semakin buruk. Selain itu, narkoba memiliki banyak dampak negatif apabila seseorang menggunakannya. Pengguna narkoba cenderung akan melakukan tindakan kriminalitas seperti membunuh, mencuri, dan lainnya untuk mendapatkan narkoba atau melindungi obat-obatan terlarang tersebut. Hampir 80% pelaku kriminal yang tertangkap merupakan Bandar atau pengguna narkoba. Sehingga, dapat disimpulkan, narkoba membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan yang merugikan pihak lain. Duterte, sejak menjabat menjadi Walikota Davao, sangat membenci hal tersebut, narkoba dan kriminalitas. Itulah alasan mengapa pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintahannya dalam beberapa tahun kedepan.

Oplan Double Barrel dapat dikatakan berhasil karena, terhitung dari 1 Juli 2016 hingga 31 Desember 2016, PNP berhasil 1.143.896 jiwa dari seluruh wilayah Filipina. Sebanyak 47,922 orang ditangkap, 2.363 terbunuh dalam operasi polisi. Dalam Project HVT, sebanyak 388 orang menyerahkan diri, 126 orang ditangkap, dan 25 terbunuh. PNP sendiri telah mengunjungi 7.031.394 rumah dalam operasi Oplan Tokhang. Kepolisian juga berhasil menangkap Bandar dan pengguna narkoba yang berada di level masyarakat atas, seperti pejabat, pengusaha, dan bahkan di kepolisian. Beberapa diantara mereka menyerahkan diri atas perintah langsung Presiden Duterte, dan mendapatkan hukumannya. Tidak hanya menangkap Bandar narkoba, kepolisian juga berhasil menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan di luar

hukum yang dilakukan oknum-oknum bersenjata. Kasus pembunuhan ini terjadi bersamaan saat Oplan Double Barrel berlangsung, sehingga masyarakat serta dunia internasional menganggap bahwa polisilah yang melakukan hal tersebut. Padahal pada kenyataannya, dari lima ribu lebih korban yang dilaporkan, hanya dua ribu jiwa yang tewas karena operasi polisi dan mereka adalah Bandar narkoba.

Sosok kuat Presiden Duterte sangat dikagumi masyarakat Filipina karena Duterte memiliki political will yang kuat demi kesejahteraan rakyatnya. Pengaruhnya saat ini sangat kuat di Filipina, dibantu dengan wataknya yang keras dan berpendirian teguh, berbagai kebijakan yang dapat mengembangkan Filipina berjalan, salah satunya adalah kebijakan War on Drug. Oplan Double Barrel terbukti dapat membuat satu juta Bandar dan pengguna narkoba menyerahkan diri ke kepolisian, berhasil menurunkan angka kriminalitas dan membuat wajah Filipina menjadi tempat yang aman dan nyaman. Kebijakan ini dapat membawa Filipina ke kondisi yang lebih baik, yakni Filipina yang terbebas dari narkoba, demi generasi penerus mereka.

Apabila Duterte mendengarkan kritik internasional lalu menghentikan kebijakan War on Drug ini, masalah narkoba di Filipina tidak akan pernah selesai. Satu juta Bandar dan pengguna yang seharusnya menyerahkan diri akan terus berkeliaran mempengaruhi lebih banyak orang untuk menggunakan narkoba. Kondisi Filipina akan semakin terpuruk dengan masalah narkoba dan berkembang ke masalah yang lebih besar. Alasan Duterte menghiraukan kritik dan saran dari internasional adalah karena Duterte yakin solusi yang internasional berikan tidak akan berhasil.

Solusi pemberantasan korupsi dengan pendekatan human rights tidak akan merubah keadaan masalah narkoba di Filipina. Maka dari itu Duterte tetap berpegang teguh pada kebijakan War on Drug versi dirinya yang sudah terbukti lebih efektif menurunkan angka peredaran narkoba.